



Kemerdekaan dan Kebebasan Pers

Khairullah, S.I.Kom, M.I.Kom



Kenyataannya,
media tidak kebal
intervensi,
terutama dari
Pemerintah.

Terkhusus bila itu
menyangkut
eksistensi dan
martabat negara.



INFORMASI PUBLIK

Hak Anda Untuk Tahu !

www.komisiinformasi.go.id

Pemerintah

Pemerintah

Masyarakat



Pers

Masyarakat Masyarakat

Pers

Pemerintah

Pers

- Mencoreng, karena dianggap menghambat kerja Pers yang sebeb-as-bebasnya.
- Menganggap informasi dapat tersebar di mana saja.
- Menganggap tindakan ini sebagai bentuk intervensi.
- Wujud transparansi dan memenuhi hak masyarakat untuk tahu.

- Dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh negara.
- Menganggap ini sebagai bentuk preventif.
- Pemberitaan tidak harus detail.

Indeks Kebebasan
Pers tidak
'selamanya'
menjamin
kemerdekaan awak
media dalam
menjalankan
tugasnya.

Hal ini sangat
bergantung pada
situasi politik,
ekonomi, sosial,
budaya dan
pertahanan-
keamanan suatu
negara.

Bagaimana Indeks Kebebasan Pers di Indonesia?



Secara nasional kemerdekaan pers Indonesia terus meningkat dan berada dalam kondisi 'cukup bebas'



Sumber: Dewan Pers



Survei dilakukan Dewan Pers dengan melibatkan **340 informan ahli** sebagai responden dan 10 anggota dewan penyalia nasional (National Assessment Council, NAC). Ada 34 provinsi yang disurvei, dengan 20 indikator.

Semakin tinggi nilai yang diberikan, maka IKP akan masuk dalam Kategori Nilai semakin "Baik", dan dengan Kondisi Kemerdekaan Pers semakin "Bebas".

Hirarki Pengaruh Media

Individu

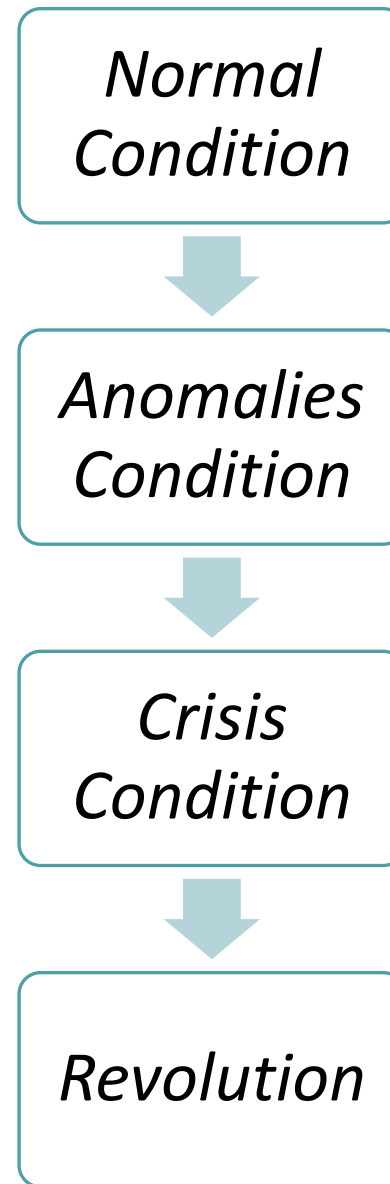
Rutinitas Media

Organisasi Media

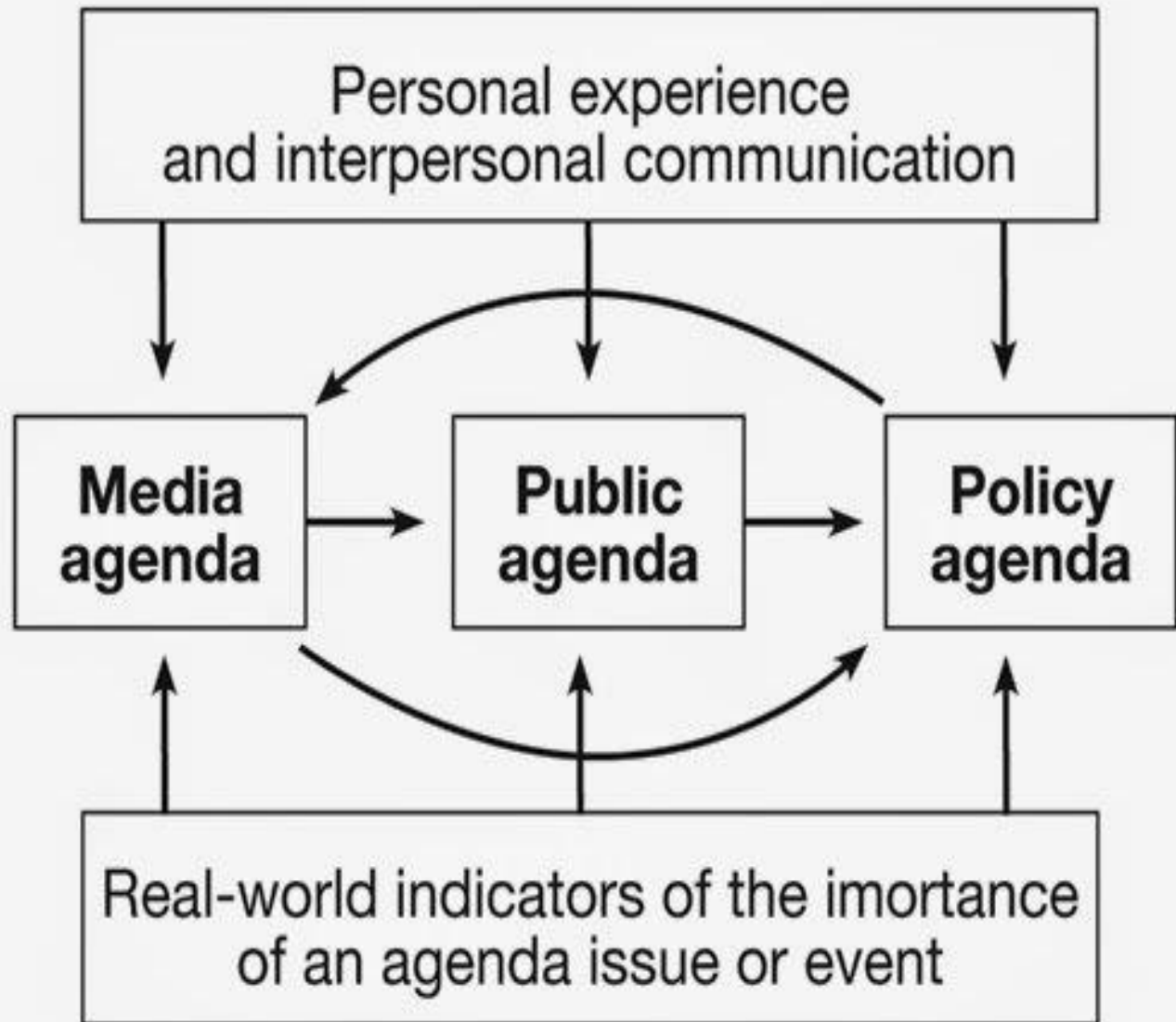
Institusi Media

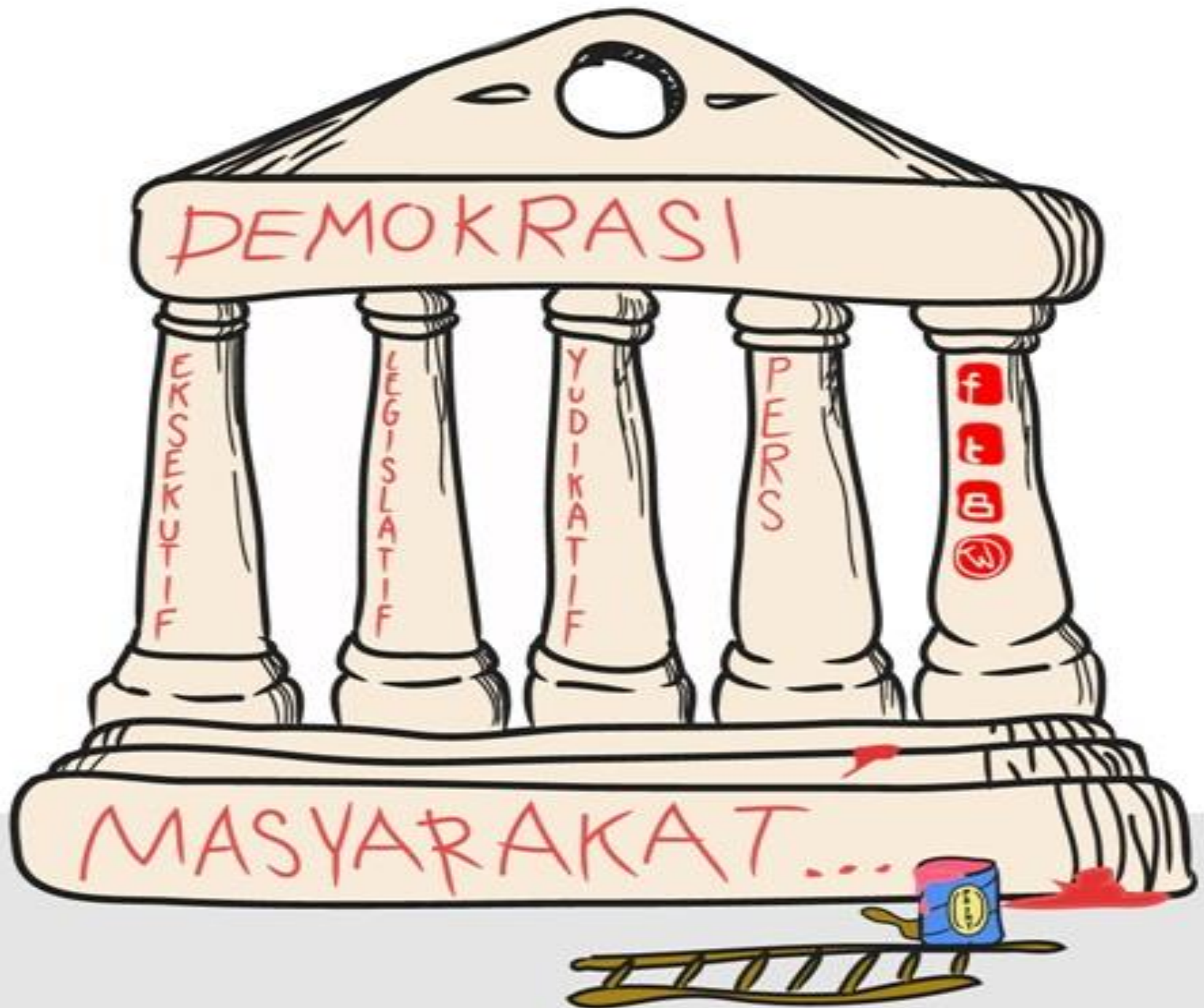
Sistem Sosial

- Meski pun kini tidak ada lagi aturan breidel di Indonesia, sesuai dengan bunyi UU Pers, sebagai berikut:
- “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran” (Pasal 4 ayat 2 UU Pers).
- Namun, negara dapat mengeluarkan aturan tertentu, sesuai dengan perkembangan kondisi terkini. Bahkan, termasuk di Amerika.



Gatekeepers and influential media





RUANG

PERIKLANAN



RUANG

REDAKSI



**APA ITU
PAGAR API?**

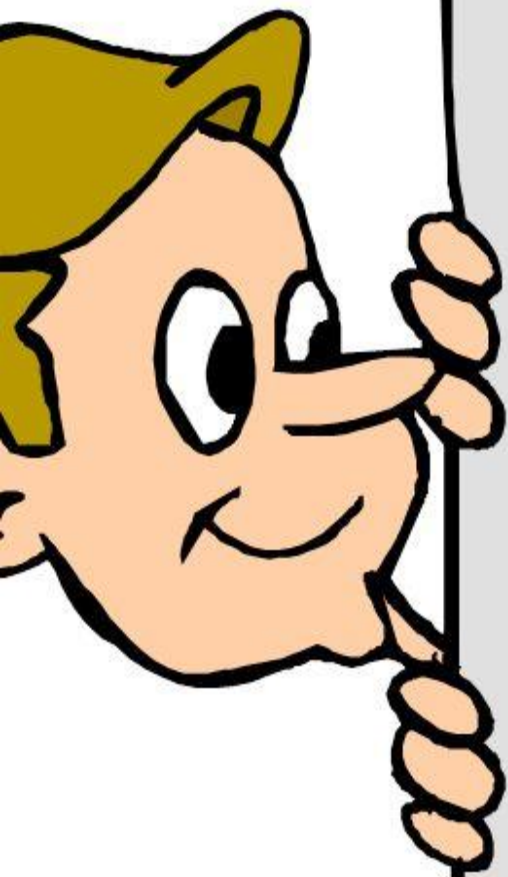
4 TEORI PERS

Fred Siebert, Wilbur Schramm, & Theodore Peterson (1963)



Pasal 28F UUD 1945

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”



Pasal 4

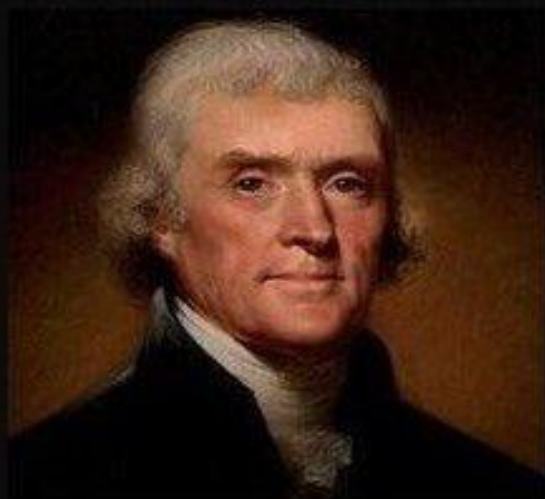
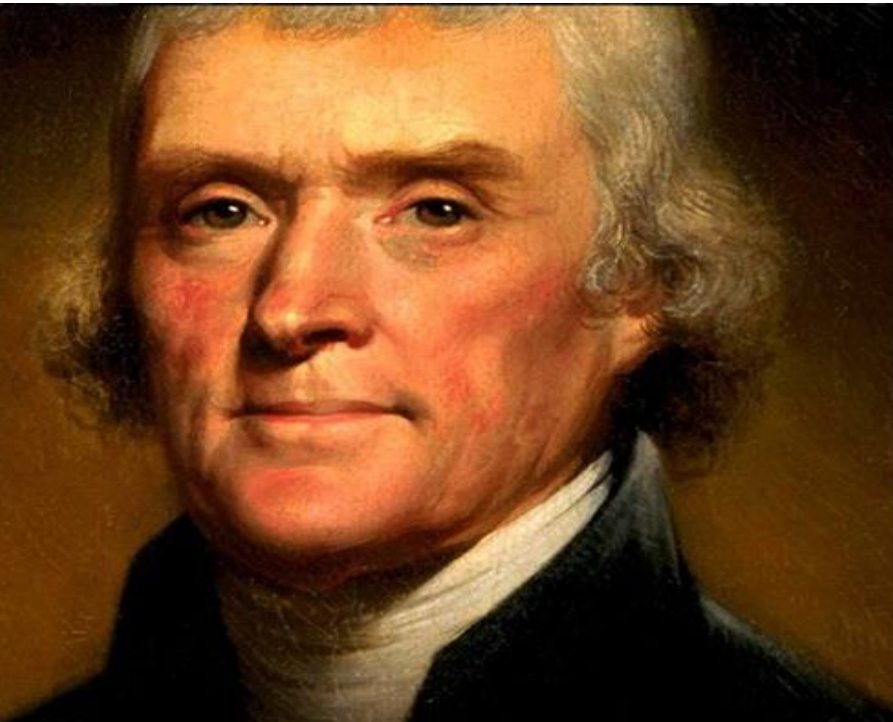
1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.





"When the speech condemns
a free press, you are hearing
the words of a tyrant."

- Thomas Jefferson



Our liberty depends on the
freedom of the press, and that
cannot be limited without being
lost.

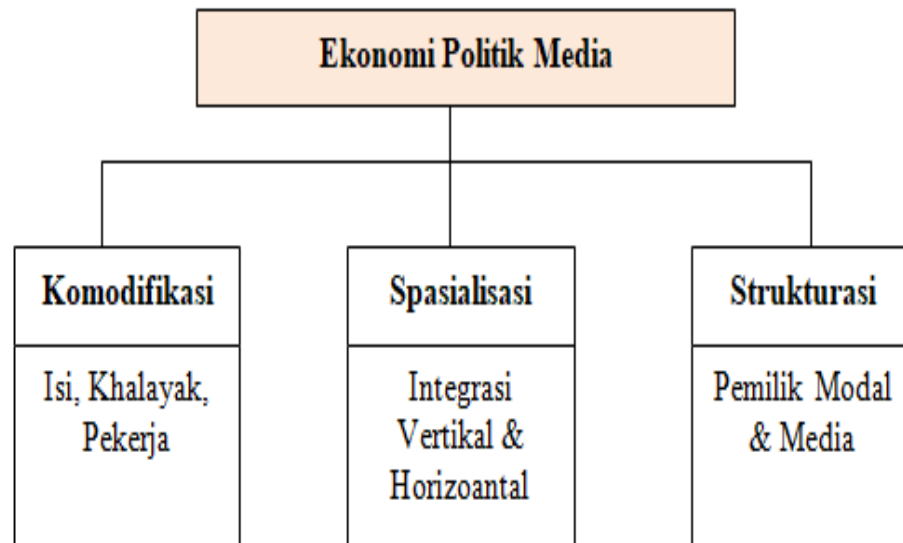
~ Thomas Jefferson

It appears to me that there is nothing that the State Courts are not competent to, but certain cases which are specially designated.



Pasal 3

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi .



Gambar 2. Konsep Ekonomi Politik Vincent Moscow

Menurut Melvin deFleur dalam *Understanding Mass Communication* (1985: 123), media massa memang tidak bisa berdiri sendiri. Pada kenyataan sehari-hari, media massa sering mendapat tekanan ekonomi dan politik (*economic and political constraints*) yang dilancarkan baik secara formal maupun informal. Oleh karena itu, menurut DeFleur, tidak ada kebebasan pers secara murni. Kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi tidak bersifat absolut. Dalam kasus-kasus khusus, kebebasan pers secara aktual berbeda dengan kerangka teoretis mengenai kebebasan pers itu sendiri. Realitas memperlihatkan pers maupun media lainnya dikelilingi oleh tekanan-tekanan ekonomi dan politik.